

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqi, Bahrin. 2014. "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Klaten 2008-2012". *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Budiman, Y. Rizal. 2015. *Jurnal Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Tiga Daerah Pemekaran di Provinsi Sulawesi Utara*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriyo, Gitosudarmo dan Basri. 2002. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta:BPFE.
- Mahmudi. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Makka, Al Harry dkk. 2015. *Jurnal Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho. 2012. "Manajemen Keuangan Negara". Diambil dari <http://nugrohodidik.blogspot.co.id/2012/12/manajemen-keuangan-negara.html?m=1> (diakses pada tanggal 15 Maret 2017)
- Prawirosentono, Suyadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE
- S. Munawir. 2004. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sucipto. 2003. *Penilaian Kinerja Keuangan*. Jurnal Akuntansi, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- _____. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Mukomuko.

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan.

_____. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

